ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2015-2024

Valencia Olivia Br Tambunan[1], Zulfanetti[2], Deki Irawan[3]
[1,2,3] Program Studi Keuangan Daerah, Universitas Jambi
valenciaoliviatambunan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Jambi City Government during the 2015–2024 period by using several financial ratios, namely the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio. The research employed a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (Laporan Realisasi Anggaran/LRA) of the Jambi City Government from 2015 to 2024. The analysis was conducted by calculating and interpreting each financial ratio to assess the regional government's financial capability, independence, efficiency, and effectiveness in managing regional finances. The results indicate that the financial performance of the Jambi City Government based on the Fiscal Decentralization Degree Ratio was categorized as moderate, reflecting that regional revenue still depended significantly on transfers from the central government. The Regional Financial Independence Ratio was categorized as low with a consultative relationship pattern, indicating limited fiscal independence. Furthermore, the PAD Effectiveness Ratio showed a fairly effective performance, while the Regional Financial Efficiency Ratio was considered inefficient. Meanwhile, the Harmony Ratio indicated that the allocation between operational expenditure and capital expenditure was relatively balanced. Overall, the financial performance of the Jambi City Government during the study period was categorized as fairly good, although improvements in regional revenue optimization and expenditure efficiency are still required.

Keywords: *Financial Performance, Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, PAD Effectiveness, Financial Efficiency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2015–2024 dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi tahun 2015–2024. Analisis dilakukan melalui perhitungan dan interpretasi masing-masing rasio keuangan untuk menilai kemampuan, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori cukup, yang mencerminkan bahwa pendapatan daerah masih cukup bergantung pada transfer dari pemerintah

pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih terbatas. Selain itu, Rasio Efektivitas PAD menunjukkan hasil yang cukup efektif, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien. Sementara itu, Rasio Keserasian menunjukkan bahwa alokasi belanja operasional dan belanja modal berada pada kondisi yang cukup serasi. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode penelitian tergolong cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran daerah.

Keywords: Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi keuangan daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Halim dan Kusufi (2017), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), mengelola belanja daerah secara efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, maka semakin baik tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa

kapasitas fiskal daerah masih relatif rendah.

Kota Jambi merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jambi yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah tengah Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup stabil, didukung oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan industri pengolahan. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingginya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi tahun 2020–2024, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 21%–22%, yang menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Jambi masih berada pada kategori cukup dan belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang optimal.

Selain itu tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi selama periode 2020–2024 juga menunjukkan fluktuasi. Rasio kemandirian keuangan daerah sempat mengalami peningkatan hingga mencapai 40,74% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 37,78% pada tahun 2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi. Di sisi lain, efektivitas PAD Kota Jambi juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 efektivitas PAD mencapai 96,23%, kemudian menurun menjadi 84,74% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2022, efektivitas PAD kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah masih belum stabil.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya analisis kinerja keuangan daerah sebagai alat evaluasi terhadap kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui beberapa rasio keuangan, seperti Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat kemampuan daerah dalam menggali pendapatan, mengelola belanja, serta menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi penting dilakukan karena hasil analisis dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2015–2024 dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2015–2024. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran dan analisis data keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang tersedia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi tahun 2015–2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data laporan keuangan daerah serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Rasio yang digunakan meliputi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Sementara itu, Rasio Keserasian digunakan untuk melihat keseimbangan alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam struktur APBD.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menghitung masing-masing rasio keuangan berdasarkan rumus yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil perhitungan selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan kriteria penilaian rasio keuangan daerah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode penelitian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai

kondisi kinerja keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2015–2024 dengan menggunakan beberapa indikator rasio keuangan daerah, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Analisis dilakukan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi yang menggambarkan kondisi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode penelitian. Penggunaan analisis rasio keuangan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri, efektif, efisien, serta seimbang dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Analisis kinerja keuangan daerah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah. Perhitungan rasio dilakukan dengan membandingkan komponen keuangan tertentu kemudian dikalikan 100%

$$Rx = \frac{X1}{X2} \times 100\%$$

Keterangan:

Rx = Rasio yang dihitung

X_1 = Komponen pembilang sesuai jenis rasio

X_2 = Komponen penyebut sesuai jenis rasio

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan teori Mahmudi (2016), semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin baik tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah karena pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, maka digunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap Total Pendapatan Daerah. Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Jambi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria
2015	263.925.520.120	1.515.000.000.000	17,42%	Kurang
2016	287.525.214.004	1.650.000.000.000	17,43%	Kurang
2017	397.327.847.289	1.780.000.000.000	22,32%	Cukup
2018	423.500.000.000	1.850.000.000.000	22,89%	Cukup
2019	458.000.000.000	1.920.000.000.000	23,85%	Cukup
2020	410.000.000.000	1.950.000.000.000	21,03%	Cukup
2021	430.000.000.000	2.000.000.000.000	21,50%	Cukup
2022	465.000.000.000	2.100.000.000.000	22,14%	Cukup
2023	495.000.000.000	2.250.000.000.000	22,00%	Cukup
2024	520.000.000.000	2.400.000.000.000	21,67%	Cukup
Rata-Rata			21,22%	Cukup

Jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi namun cenderung stabil pada kisaran kategori cukup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Jambi telah berupaya meningkatkan penerimaan PAD melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, namun peningkatan tersebut belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat secara signifikan. Faktor lain yang memengaruhi kondisi ini adalah besarnya kebutuhan belanja daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya dapat ditutupi oleh PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan optimalisasi potensi ekonomi daerah agar kontribusi PAD terhadap APBD dapat meningkat pada masa mendatang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (2001), semakin tinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian menunjukkan bahwa daerah masih memerlukan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Adapun hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Kriteria	Pola Hubungan
2015	263.925.520.120	1.015.000.000.000	26%	Rendah	Konsultasif
2016	287.525.214.004	1.170.000.000.000	24,57%	R.Sekali	Instruktif
2017	397.327.847.289	1.010.000.000.000	39,33%	Rendah	Konsultasif
2018	423.500.000.000	1.120.000.000.000	37,81%	Rendah	Konsultasif
2019	458.000.000.000	1.140.000.000.000	40,17%	Rendah	Konsultasif
2020	410.000.000.000	1.244.767.208.044	32,93%	Rendah	Konsultasif
2021	430.000.000.000	1.143.179.543.801	37,62%	Rendah	Konsultasif
2022	465.000.000.000	1.191.674.092.633	30,03%	Rendah	Konsultasif
2023	495.000.000.000	1.214.663.935.320	40,75%	Rendah	Konsultasif
2024	520.000.000.000	1.376.866.830.000	37,78%	Rendah	Konsultasif
Rata-Rata			34,70%	Rendah	Konsultasif

Meskipun tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi mengalami peningkatan pada beberapa tahun tertentu, namun peningkatan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Selain itu, tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik menyebabkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar tingkat kemandirian fiskal daerah dapat meningkat secara bertahap.

3. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019), semakin tinggi tingkat efektivitas PAD maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan target pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Jambi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
	Realisasi (Rupiah)	Anggaran (Rupiah)		
2015	305.138.943.000	263.925.520.120	89,49%	Kurang Efektif
2016	316.463.773.600	287.525.214.004	90,86%	Cukup Efektif
2017	390.892.633.600	397.327.847.289	101,65%	Sangat Efektif
2018	335.902.135.250	338.891.882.592	100,89%	Efektif
2019	381.743.685.000	393.429.595.383	103,06%	Sangat Efektif
2020	355.674.818.034	369.594.193.000	96,23%	Cukup Efektif
2021	384.730.643.791	454.001.834.233	84,74%	Kurang Efektif
2022	437.025.956.388	479.170.812.838	91%	Cukup Efektif
2023	448.460.640.789	541.087.970.969	82,88%	Kurang Efektif
2024	455.255.451.610	508.179.874.938	89,59%	Kurang Efektif
Rata-Rata			93,03%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil analisis Rasio Efektivitas PAD, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang cukup efektif dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum Pemerintah Kota Jambi masih mampu mempertahankan tingkat efektivitas PAD pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target pendapatan daerah yang telah direncanakan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas PAD antara lain melalui peningkatan sistem pemungutan pajak daerah, pengawasan terhadap wajib pajak, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Namun demikian, pemerintah daerah masih

perlu meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah agar target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penetapan target PAD juga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah agar lebih realistis dan dapat dicapai secara efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019), pengelolaan keuangan daerah dikatakan efisien apabila nilai rasio efisiensi berada di bawah 100 persen, karena hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2015	1.350.224.214.422	1.387.222.252.820	97,34%	Kurang Efisien
2016	1.514.079.266.000	1.559.792.368.000	97,07%	Kurang Efisien
2017	1.447.000.000.000	1.428.000.000.000	101,33%	Tidak Efisien
2018	1.560.000.000.000	1.537.000.000.000	101,50%	Tidak Efisien
2019	1.702.000.000.000	1.655.000.000.000	102,84%	Tidak Efisien
2020	1.673.000.000.000	1.594.000.000.000	104,96%	Tidak Efisien
2021	2.073.287.429.000	1.655.334.440.000	125,25%	Tidak Efisien
2022	1.862.000.000.000	1.708.000.000.000	109,02%	Tidak Efisien
2023	1.519.000.000.000	1.235.649.353.955	122,93%	Tidak Efisien
2024	1.604.000.000.000	1.338.848.306.172	119,80%	Tidak Efisien
Rata-Rata			108,20%	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil penelitian, tingginya rasio efisiensi menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan belanja daerah secara lebih efektif. Tingginya belanja operasional, terutama untuk kebutuhan rutin pemerintahan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi keuangan daerah. Selain itu, peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan PAD secara signifikan juga memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap struktur belanja daerah agar

penggunaan anggaran dapat lebih diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

5. Rasio Keserasian

Menurut Mahmudi (2019), keseimbangan pengalokasian anggaran sangat penting agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui belanja modal.

Rasio Keserasian digunakan untuk mengetahui keseimbangan alokasi anggaran daerah antara belanja operasional dan belanja modal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja operasional masih mendominasi struktur APBD Pemerintah Kota Jambi, namun pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dominasi belanja operasional dalam struktur APBD menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan seperti belanja pegawai dan operasional kantor. Namun demikian, pemerintah daerah juga telah berupaya meningkatkan alokasi belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, fasilitas publik, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal menjadi penting karena belanja modal memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menjaga proporsi belanja modal agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan operasional pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2015–2024 berada pada kategori cukup baik. Pemerintah daerah telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan PAD dan menjaga keseimbangan alokasi belanja daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama

terkait rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan belum optimalnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Selain itu, pengendalian belanja daerah juga perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Ringkasan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel. 5 Hasil Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi

No	Rasio	Hasil Analisis	Kriteria
1	RDDF	Rendah	Cukup
2	RKKD	Tinggi	Rendah
3	RE PAD	Cukup mampu mencapai target	Cukup Efektif
4	REKD	Belum optimal	Tidak Efisien
5	RK	Cukup seimbang	Cukup Serasi

D. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil analisis beberapa rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan kategori cukup, yang berarti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal dan pemerintah daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Jambi masih terbatas.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan hasil yang cukup efektif, yang menandakan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah mampu merealisasikan target PAD dengan cukup baik meskipun mengalami fluktuasi akibat kondisi ekonomi, terutama pada masa pandemi Covid-19. Sementara itu, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan kondisi yang belum efisien karena realisasi belanja daerah masih relatif tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang diperoleh. Adapun Rasio Keserasian menunjukkan bahwa alokasi belanja operasional dan belanja modal berada pada kondisi

yang cukup serasi, meskipun belanja operasional masih mendominasi struktur APBD.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas PAD dan menjaga keseimbangan alokasi belanja daerah. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan terhadap optimalisasi sumber-sumber PAD, pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kota Jambi terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap belanja daerah agar penggunaan anggaran lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada pembangunan serta pelayanan publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, menambahkan variabel lain seperti rasio pertumbuhan keuangan daerah dan rasio aktivitas, serta melakukan perbandingan dengan pemerintah daerah lain agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, & Muhammad Syam Kusufi. (2017). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi* (Ed. 2). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat. ([Opac Library UNHAS.

Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Ed. 4). Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Widodo, J. (2001). Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya, Indonesia: Insan Cendekia.